

Kabupaten Martanimpoena
di Praja Mangkunegaran tahun 1942 – 1947

Disusun Oleh:
Hari Nur Prasinta
C 0505030

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik keraton menjelang tahun 1940-an ditandai oleh dua hal, yaitu persaingan antara Kasunanan dan Mangkunegaran dan suksesi di Kasunanan¹. Alasan yang menjadi dasar persaingan ini adalah ketidaksudian kraton Kasunanan menerima kemandirian Mangkunegaran yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. Sejak awal, sikap Susuhunan tidak menginginkan Mangkunegara bertindak melebihi kekuasaannya sehingga Mangkunegaran merupakan suatu pemberian pribadi, bukan hak turun-temurun kepada Mangkunegara I. Ketegangan yang muncul di balik serangkaian insiden yang sepele, pada dasarnya merupakan pertentangan pribadi dan ambisi Paku Buwono dengan kehendaknya untuk menegaskan sebagai penguasa tradisional yang tertinggi.

¹ Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Wonogiri: Bina Citra Pustaka. Halaman 37.

Munculnya campur tangan Belanda dan Jepang terhadap Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran menambah semakin memuncaknya kontroversi antara Jepang dengan Belanda.. Jepang banyak memberikan bantuan dan perhatian terhadap Praja Mangkunegaran mengakibatkan menambah semakin panasnya reaksi Belanda. Perubahan dalam kedudukan konstitusional Kasunanan yang dari status “*vasal*” dengan semi-otonomi menjadi sebuah “badan hukum” (*rechtspersoon*), yaitu meleburnya wilayah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Hindia-Belanda dengan adanya kontrak-kontrak yang ditandatangani tahun 1940 dengan kepala Kasunanan dan Mangkunegaran.

Ketegangan meningkat antara Kasunanan dengan Mangkunegaran terlihat pada pertengahan hingga akhir tahun 1940, disebabkan adanya serangan jurnalistik yang sensasional terhadap Mangkunegaran bertujuan untuk menodai citra pegawai-pegawainya.

Keberadaan kraton tidak terlepas dari keberadaan raja yang memiliki arti penting sebagai eksponen mikrokosmos dan makrokosmos. Raja merupakan *Hyang Sukma Kawekas* karena dianggap mampu bertindak *wicaksana* (bijaksana) dan *waskita* (melihat hal-hal yang rahasia), sehingga tidak aneh apabila raja begitu dihormati rakyatnya. Selain itu, raja juga berperan sebagai *vorstendomein* (hak milik raja) bahwa raja adalah pemilik tanah di seluruh kerajaan. Di dalam sistem apanage para *patuh* hidup dari hasil tanah yang digarap petani. Tanah-tanah yang menghasilkan padi misalnya, hasilnya dibagi dua atau *maro*, untuk *patuh* dan petani sama besar. Bagian yang diserahkan kepada *patuh* disebut pajak. Selain dalam bentuk barang, pajak dapat berupa uang yang dibayarnya satu *real* tiap *jung*. Di samping

pajak, masih ada pungutan dari patuh yang disebut *pundhutan*, atau *taker turun*, sedangkan berasal dari petani disebut *sumbangan* untuk berbagai macam keperluan.² Selain itu *pajeg* dapat dibayar dengan uang (sistem *majegan*) atau dalam natura (sistem *maro* atau *maron*). Pemungut *pajeg* pada awalnya dilakukan oleh para *bekel*.³

Kekuasaan kolonial Belanda yang lama meninggalkan berbagai bentuk penderitaan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi lapisan terbawah. Kekurangan pangan, sandang, papan dan rendahnya tingkat kesehatan telah membebani pundak rakyat. Upah kerja yang rendah, rutinitas kerja paksa dan pajak yang harus dibayar, berjalan begitu saja dalam upaya eksploitasi dengan diiringi diskriminasi. Pemerintah kolonial cenderung mengeruk keuntungan, yang semakin banyak yang membuat rakyat Indonesia menderita, tetapi juga kelangsungan pemerintahan Hindia-Belanda.⁴ Karesidenan Surakarta merupakan daerah yang subur dan luas. Sehingga memiliki areal perkebunan yang luas pula, selain empat dasar agroindustri, di Surakarta masih terdapat perkebunan kecil antara lain kapas, lada, pala, coklat, panili dan padi. Kehidupan petani di tanah partikelir memang berat karena berbagai pajak dan layanan, yang disebut *cuke*, yang harus diserahkan kepada tuan-tuan tanah Belanda dan China. Pada dasarnya petani yang tinggal di tanah-tanah mereka harus membayar

² Suhartono, 1995, *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media. Halaman 58.

³ *Pajeg* merupakan istilah pajak dalam bahasa Jawa. Kemudian *bekel* merupakan seseorang yang diangkat oleh raja sebagai kepala daerah yang memperoleh tanah lungguh. Untuk lebih jelasnya baca dalam bukunya Scheltema, 1985, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 152-159.

⁴ Julianto Ibrahim, 2004, *op. cit.*, halaman 57-58.

pajak antara lain berupa sebagian hasil panen, uang dan layanan tenaga kerja. Karena itu, tuan-tuan tanah mengangkat petugas administrasi dan pengawas pajak.⁵

Petani dikenakan layanan kerja yang disebut *kompénian*, yaitu kerja wajib yang dilakukan lima hari sekali dalam sebulan. Selanjutnya petani masih dituntut kerja untuk umum yang disebut *garol*, tiga hari setiap bulan, *kroyo*, hanya untuk orang dewasa, dan tugas *kemit* berupa ronda atau jaga.⁶ Pada waktu penarikan *cuke*, pajak dan sejenisnya, petugas pajak menghadapi kesulitan. Petani tidak mau membayar pajak, karena selain terlalu berat mereka juga tetap membayarnya meskipun panen gagal yang disebabkan oleh gangguan alam, penyakit tanaman dan sejenisnya.

Kemenangan Jepang atas serangannya terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 dalam Perang Dunia ke-II⁷, Jepang berhasil menguasai daerah Malaya (sekarang Malaysia), Filipina dan Indonesia. Berawal dari itulah Jepang mulai mengeksploitasi Asia secara besar-besaran yang didukung dengan kondisi wilayah di Asia terutama Indonesia yang subur dan kaya akan sumber daya alamnya.

Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia sampai ke tingkat desa dan dihadapkan pada rezim kolonial yang bersifat sangat menindas dan merusak bangsa Indonesia. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian yakni Sumatera berada di bawah pimpinan Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16; kedua

⁵ Suhartono, 1995, *op. cit.*, halaman 85.

⁶ *Ibid*, halaman 87.

⁷ J. Siboro, 1989, *Sejarah Australia*, Bandung: Tarsito. Halaman 179.

wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Karena Jawa dianggap sebagai wilayah yang secara politik paling maju dengan sumber daya manusianya yang banyak. Hal itu sesuai dengan kebijakan politik di Jepang bahwa daerah kekuasaan yang kurang maju dengan ekonomi yang penting berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, sedangkan untuk wilayah yang maju berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, wilayah ini meliputi wilayah Indonesia bagian timur termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian.⁸

Selama pendudukan Jepang citra kedua puri di Surakarta mulai menurun. Keluarga raja-raja di Surakarta tidak berusaha untuk menjauhkan dirinya dari penguasa pendudukan Jepang. Ekonomi perkebunan yang runtuh mengakhiri sumber penting bagi dana kerajaan. Inflasi pun dengan serius mengurangi daya beli dari gaji para pegawai kerajaan. Organisasi-organisasi setempat yang disponsori oleh Jepang yang didominasi oleh keluarga raja dan kaum politikus keraton.⁹

Pembiayaan negara di suatu kerajaan dalam artian modern, diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan menyeluruh untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara secara keseluruhan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya suatu perbendaharaan (sistem keuangan) negara yang dikelola oleh pusat tetapi juga karena cara-cara yang insidental untuk memenuhi keperluan keuangan negara. Setiap keperluan seperti perbaikan jalan, biaya hidup para pejabat, bagian pengangkutan

⁸ Ricklefs, M.C, 2005, *Sejarah Indonesia Modern cetakan ke-delapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman 297-298.

⁹ Larson, George D, 1990, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman 308-310.

mempunyai sumber pendapatan sendiri, yang mungkin berupa sebidang tanah, pungutan tertentu, atau tenaga manusia di desa tertentu. Pemeliharaan suatu bagian pemerintahan (departemen), kantor atau lembaga, diserahkan seluruhnya kepada kesanggupan dan pertimbangan moral si pemegang jabatan.

Kewenangan setiap kraton untuk memiliki daerah kekuasaan dan sumber penghasilan, maka Praja Mangkunegaran juga memiliki kebijakan terhadap pelaksanaan sistem pajak yang ada. Mangkunegaran sebagai daerah swapraja mempunyai kebijakan administratif birokrasi dari struktur pemerintahan.

Urusan dalam pemerintahan untuk Praja Mangkunegaran memiliki pangreh praja yang mengurus di dalam masing-masing bidang. Untuk daerah pusat terbagi menjadi tiga kabupaten (departemen) yakni *Kabupaten Nata Praja* yang mengurus tentang urusan pemerintahan, *Kabupaten Niti Praja* termasuk di dalamnya *Kabupaten Martapraja* yang bertugas mengurus kas atau keuangan serta pajak dan *Reksa Hartana* yang mengurus tentang beasiswa dan pensiunan. Praja Mangkunegaran membentuk sebuah kabupaten yang menangani tentang urusan pajak. Hal ini bertujuan agar sistem pelaksanaannya berjalan lancar dan teratur, meskipun pada masa penguasa sebelumnya sudah ada lembaga yang mengurus sistem pajak tersebut.

Keraton mempunyai sumber penghasilan sendiri untuk setiap kebutuhannya yang bermacam-macam, sumber-sumber itu dapat berupa daerah tertentu yang menyediakan beras untuk keperluan dapur istana, desa tertentu yang menyediakan minyak kelapa dan hutan tertentu untuk menyediakan kayu bagi bangunan istana. Walaupun dapat dikumpulkan kekayaan yang besar bagi bea dan cukai, kerajaan sebagai suatu organisasi institusional yang sangat mengandalkan petani, yang dapat

memberikan tenaga yang diperlukan tidak hanya untuk mengerjakan sawah tetapi melakukan pekerjaan untuk memelihara dan menopang kerajaan, mulai dari pekerjaan untuk memelihara jalan sampai pengangkutan barang, dan menjadi pelayan para bangsawan atau pejabat dan berperang menjadi tentara raja. Penguasaan daerah yang berpenduduk padat merupakan suatu keuntungan besar bagi Praja Mangkunegaran sendiri. Berkaitan dengan pentingnya kepadatan penduduk, maka perlu adanya *cacah*, untuk menunjukkan ukuran luas daerah penguasaan dipandang dari segi luas tanah yang dikenai pajak.¹⁰

Periode sistem kekuasaan selama tiga kali perubahan yakni masa peralihan kekuasaan Belanda, kemudian Jepang dan masa revolusi fisik banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan ekonomi dan sosial-politik terhadap kehidupan di wilayah Surakarta begitu juga di wilayah Praja Mangkunegaran. Sistem kebijakan masing-masing penguasa yang mengubah sistem tatanan ekonomi mulai dari sistem perkebunan dengan penyerahan pajak pada masa Belanda lalu kewajiban setor padi pada masa pendudukan Jepang yang sangat membebani rakyat. Pada masa akhir perang, Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi “mencukupi kebutuhan sendiri” (*genchi jikatsu*) bertujuan untuk memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang.¹¹ Hal ini juga berpengaruh terhadap sistem pendapatan yang diperoleh Praja

¹⁰ Soemarsaid Murtono, 1985, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 139-144.

¹¹ Anton E. Lucas, 1989, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Halaman 39-40.

Mangkunegaran, karena sistem pendapatan utama dari praja ini adalah pajak dari rakyat di wilayah kekuasaannya selain dari sektor perkebunan.

Pemerintah Jepang menetapkan Jawa sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau di luar Jawa bahkan sampai ke luar negeri. Wajib serah padi telah dimulai di Jepang pada bulan Oktober 1940, dengan dikeluarkannya *Beikoku Kanri Kisoku* (Peraturan untuk Kontrol Beras), yang di dalamnya memuat kebijakan di Jawa.¹² “Wajib serah” padi secara resmi diawali dengan dikeluarkannya dekrit di setiap karesidenan, dan masing-masing karesidenan diizinkan untuk menetapkan dekrit tersebut sesuai kehendak mereka. Suatu karesidenan dianggap sebagai suatu unit otonom untuk produksi dan sirkulasi komoditi.

Tujuan utama Jepang datang ke Surakarta adalah untuk pengumpulan produksi pertanian seperti beras, jarak, rami, kapas. Kebutuhan tentara Jepang adalah beras maka didirikan lembaga yang menangani urusan ini bernama *Beikoku Orosi Uri Kumiai* (BOK).¹³ Dengan demikian maka Jepang dapat memanfaatkan birokrat ini sebagai pelaksana harian dari program-programnya. Bagi Mangkunegaran sendiri, lembaga ini terutama para pemimpinnya yang memiliki popularitas pada masyarakat Surakarta diwajibkan untuk mempropagandakan program perang Jepang.¹⁴

¹² Aiko Kurasawa, 1993, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo. Halaman 70-74.

¹³ *Kan Po*, 10 Oktober 1940 dan *Kan Po*, 9 Mei 1943. Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran. Lihat juga dalam *Sinar Matahari* 22 Desember 1944. Dokumen Monumen Pers Nasional Surakarta.

¹⁴ *Kung Jung Pao*, 9 Maret 1944. Arsip Rekso Pustaka; Propaganda dan dukungan kepada program perang Jepang di Surakarta diutamakan terhadap penyuluhan pertanian yang berupa penerangan.

Berakhirnya masa kolonial menyebabkan perubahan kondisi ekonomi Praja Mangkunegaran. Pengambilalihan seluruh sektor ekonomi kecuali pajak pasar di Praja Mangkunegaran dilakukan demi tujuan program ekonomi perang Jepang. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dari beberapa pos ekonomi Mangkunegaran yang diambilalih Jepang menghilang bahkan menurun. Pada industri utama Mangkunegaran seperti gula dan teh terjadi penurunan mengingat keinginan Jepang untuk membatasi produksi gula yang disebabkan pengalihan fungsi lahan tebu dan kontrol gula mengingat hancurnya jalur perdagangan gula internasional. Lahan itu harus diganti dengan tanaman padi dan jarak yang sesuai dengan keinginan Jepang. Ketiadaan anggaran pemerintah ini sesuai dengan keinginan pemerintah Jepang untuk memperluas sikap ketergantungan yang diperlihatkan dengan mengganti pembiayaan otonom dengan penggajian kaum birokrat secara terpusat.

Perubahan sistem kebijakan pemerintah penguasa sangat berpengaruh terhadap sistem birokrasi di Praja Mangkunegaran. Perubahan itu juga terjadi pada *Kabupaten Martanimpoena* dalam struktur pegawai dalam menarik pajak. Semasa pendudukan Kolonial Belanda tahun 1940an terdapat dua sistem pemerintahan, pemerintahan Belanda dan kerajaan, sehingga sistem pajak juga diterapkan oleh Belanda (Gubernemen Lama) dan Praja Mangkunegaran. Struktur pegawai masih mengikuti struktur birokrasi Belanda. Jepang berkuasa tahun 1942, sistem pemungutan pajak dikembalikan kepada pemerintah Mangkunegaran dengan pengawasan dari pemerintah Jepang. Praja Mangkunegaran memungut pajak dari rakyat dan harus menyerahkan kepada pemerintah Jepang. Struktur pegawai pemerintahan masih menggunakan sistem Belanda tetapi juga ada perubahan dalam struktur pemimpin

suatu daerah. Masa kemerdekaan tahun 1945 pemerintah pusat telah mengambilalih semua urusan kerajaan, bahkan untuk sistem penarikan pajak juga diambilalih oleh pemerintah pusat.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas hasil penelitian dapat ditulis dengan judul “*Kabupaten Martanimpoena di Praja Mangkunegaran tahun 1942 – 1947*”, karena pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting mulai dari akhir kekuasaan Belanda, awal penjajahan Jepang, masa perang merebut kemerdekaan dan revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah termasuk daerah Surakarta pada tahun 1946 serta mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi politik, sosial dan ekonomi di Surakarta pada tahun 1942-1947 ?
2. Bagaimana Sistem Pajak yang dikelola oleh *Kabupaten Martanimpoena* di Praja Mangkunegaran pada tahun 1942-1947 ?
3. Bagaimana pengaruh peristiwa sosial-politik pada tahun 1942-1947 terhadap *Kabupaten Martanimpoena* di Praja Mangkunegaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi politik, sosial dan ekonomi di Surakarta pada tahun 1942-1947.
2. Mengetahui Sistem Pajak yang dikelola oleh *Kabupaten Martanimpoena* di Praja Mangkunegaran pada tahun 1942-1947.
3. Mengetahui peristiwa sosial-politik tahun 1942-1947 yang berpengaruh terhadap *Kabupaten Martanimpoena* di Praja Mangkunegaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan baru, terutama pengetahuan mengenai kajian sistem perekonomian dalam kerajaan tradisional (*vorstenlanden*) khususnya pajak di Praja Mangkunegaran.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tentang eksistensi birokrasi dari lembaga pajak yakni *Kabupaten Martanimpoena* dalam tiga periode serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sumbangan studi sejarah pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah ini menggunakan beberapa referensi pustaka. Referensi itu antara lain: *Rijksblaad Mangkunegaran tahun 1867-1913 serie D Vorstenlanden No.58* tentang organisasi pemerintahan di Praja Mangkunegaran. Peraturan kebijakan daerah ini merupakan referensi utama dalam penelitian ini dikarenakan sebagai pedoman tentang struktur birokrasi pemerintahan yang meliputi masing-masing kabupaten. *Rijksblaad* tersebut menyebutkan bahwa *Kabupaten Martanimpoena*

digolongkan dalam *Kawedanan Kartapradja* yang mengatur tentang administrasi kerajaan.

Buku mengenai sejarah Mangkunegaran karya Muhlenfeld yang berjudul *Geschiedenis der Eigeendom van Het Mangkoenegorosche Rijk* tahun 1987, diterjemahkan oleh Moehammad Hoesodo Pringgodigdo pada tahun 1987 dengan judul *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran* yang isinya mengenai usaha-usaha Mangkunegoro untuk memajukan perekonomian seiring perjalanan sejarah Mangkunegaran. Kebutuhan akan pembiayaan hidup dan penggajian para birokrat berasal dari pendapatan hasil perkebunan selain dari pajak. Buku ini berisi tentang industri perkebunan yang berada di wilayah kekuasaan Mangkunegaran, seperti Wonogiri, Karanganyar dan wilayah di sekitarnya. Peningkatan dan penurunan hasil perkebunan juga dijelaskan dalam buku ini. Relevansi dari buku ini tentang skripsi ini adalah mengenai sejarah ekonomi perkebunan di Praja Mangkunegaran.

Artikel oleh Onghokam yang berjudul “Pajak dalam Perspektif Sejarah” yang dimuat dalam *Majalah Prisma* edisi 4 tahun 1984, membicarakan mengenai pajak yang dipandang melalui perspektif sejarah, bahwasanya pajak pada masa kerajaan tradisional merupakan sebuah kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang dan sering menimbulkan sebuah protes dan perlawanan. Akan tetapi dalam sebuah Negara yang modern pajak sudah berubah fungsi menjadi alat pemerataan. Artikel tersebut dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak dengan perspektif historis, dimana kita dapat melihat perbedaan konsepsi tentang hakekat dan fungsi pajak pada kerajaan-kerajaan tradisional dan berbagai kesatuan politik masa lampau dengan Negara-negara modern dewasa ini.

Buku tentang *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan, Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta tahun 1942 sampai 1949* karangan Julianto Ibrahim. Berisi mengenai kondisi sosial di Surakarta terutama masalah perbanditan di Surakarta pada masa revolusi kemerdekaan yakni antara tahun 1942 sampai 1945. Munculnya para bandit yang dikenal dengan *kecu* dan *benggol* akibat adanya sistem kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang sangat bertentangan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tekanan-tekanan itu menyebabkan tindak kriminalitas seperti penyelundupan candu, pemalsuan uang dan penimbunan uang receh. Itu semua sangat mempengaruhi kondisi ekonomi terutama sistem keuangan di Surakarta. Para bandit ini menganggap dirinya seorang pahlawan atau jagoan tetapi dengan mencampuradukan dua dunia yang bertolak belakang. Mereka melakukan aksi penggedoran dan kerusuhan di Surakarta guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Buku ini memberikan relevansi terhadap tema skripsi yaitu tentang kondisi sosial-ekonomi yang mengakibatkan munculnya tindakan kriminalitas di Surakarta akibat politik yang diterapkan oleh Pemerintahan Jepang.

Aiko Kurasawa yang menulis tentang *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Buku ini berisi tentang kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, dengan menerapkan beberapa kebijakan yang mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Mobilisasi Jepang guna mempropagandakan program-program perangnya dalam bidang pertanian. Adanya kebutuhan ekonomi tentara Jepang yang banyak sehingga mereka melakukan eksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran (*Romusha*), wajib serah padi sebagai ganti sistem pajak yang berlaku. Mereka

mempropagandakan dengan melalui para pangreh praja bahkan sampai ke desa-desa. Dalam waktu singkat Jepang kebutuhan akan ekonomi tercapai tetapi kondisi sosial masyarakat sangat mengenaskan. Relevansi dalam buku ini terhadap kajian skripsi saya banyak menjelaskan tentang usaha-usaha Jepang untuk melaksanakan kebijakannya guna memenuhi kebutuhan ekonomi perang.

Adanya gerakan revolusi sosial di berbagai daerah sebagai akibat dari adanya revolusi nasional yakni dalam bukunya Anton E. Lucas yang berjudul *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi tahun 1945 sampai 1947*. Buku ini banyak menjelaskan berbagai aksi dari masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan suatu perubahan yang meliputi di berbagai bidang akibat kekuasaan penguasa daerah serta para penguasa dari luar yang sewenang-wenang sebagai dampak adanya penjajahan. Selain itu sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peristiwa dalam buku ini merupakan suatu kerusuhan pada masa terjadi revolusi di Indonesia setelah kemerdekaan yang dipelopori oleh golongan masyarakat tertentu, misalnya *lenggaong, kecu* dsb. Karena mereka merasa sakit hati sehingga dendam terhadap para pegawai pemerintah daerah maupun pemerintahan Belanda maupun Jepang yang merendahkan harga dirinya sebab dianggap tidak ada dan tidak berguna. Oleh sebab itulah peristiwa ini termasuk revolusi sosial. Selain di tiga daerah itu, revolusi sosial ini juga merambah ke berbagai daerah di Indonesia seperti di Bogor, Surakarta, Malang dan sebagainya. Relevansinya yaitu bahwa buku ini banyak menjelaskan kesamaan latarbelakang munculnya suatu revolusi sosial sebagai dampak munculnya kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masa akhir kekuasaan Jepang serta setelah kemerdekaan.

Referensi dari skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pajak termasuk struktur organisasinya, kebijakan ekonomi di Praja Mangkunegaran. Referensi meliputi: *Status, Fungsi & Tugas Kewajiban Pepalih Dalem Praja Mangkunegaran setelah terjadinya Kekuasaan Swapraja tahun 1946* karya Haryanti Ismuntari tahun 1996, yang menjelaskan tentang struktur pegawai pemerintahan di Praja Mangkunegaran setelah munculnya swapraja, pembagian wilayah atau kabupaten-kabupaten di Praja Mangkunegaran yang lebih jelas dan sesuai dengan bidangnya. Awalnya kabupaten atau departemen itu digabungkan dalam jumlah yang besar dan tidak berdasarkan permasalahan yang ditangani.

Ira Pramuda Wardani tahun 2000, *Pembentukan Surakarta Kochi dalam Birokrasi Tradisional Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Pembentukan Kochi Surakarta sangat berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi di Surakarta. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Jepang untuk meningkatkan ekonomi perang yang sangat besar. Hal itu tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Praja Mangkunegaran.

Skripsi karya Sumantri Ibnu R. yang berjudul *Sistem Perpajakan dan Pemanfaatannya di Praja Mangkunegaran Tahun 1917-1942*. Dalam skripsi tersebut hanya menyebutkan mengenai jenis-jenis pajak yang diterapkan di wilayah praja Mangkunegaran secara umum. Dalam penelitian ini skripsi tersebut bermanfaat untuk mengetahui jenis pajak yang diterapkan di wilayah praja Mangkunegaran. Karya ini menerangkan hal-hal sebagai berikut : Pelaksanaan sistem perpajakan di Praja Mangkunegaran tahun 1917-1942, peranan inspektur pajak, pengaruh penarikan pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan penduduk di praja Mangkunegaran. Selain

itu juga menerangkan mengenai jenis-jenis pajak dan pemanfaatannya di praja Mangkunegaran.

Pengaruh Kebijakan Penanaman Jarak terhadap Kehidupan Penduduk masa Penjajahan Jepang oleh Endang Rismiyati tahun 2005. kebijakan Jepang banyak diutamakan dalam bidang pangan serta untuk perang. Kebutuhan akan minyak senjata serta bahan makanan para tentara untuk menghadapi Sekutu. Berbagai propaganda telah dilakukan oleh pemerintah Jepang termasuk penggalakan menanam jarak yang bermanfaat untuk menghasilkan minyak. Kondisi masyarakat semakin menderita dengan adanya kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh Jepang.

F. Metode Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses mengumpulkan, menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan pada masa lampau dan usaha-usaha melakukan sintesa dari data-data masa lampau menandai kajian yang dapat dipercaya.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan¹⁵ yakni:

- a. *Heuristik*, yakni proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sebagai data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pencarian dan pengumpulan sumber yang dilakukan oleh peneliti baik itu sumber primer yang berupa dokumen-dokumen arsip baik itu arsip Belanda maupun lokal maupun surat

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 60-62.

kabar yang sejaman yakni *Adatrechtsbundel* No.58 ”*Vorstenlanden*”, *Rijksblad* Mangkunegaran tahun 1917 No. 5Q, *Osamu Sirei* No. 36 tahun 1942, *Staatsblad* No. 614 tahun 1939, Surat Pameksa, Peraturan & kebijakan masalah urusan pajak di Mangkunegaran, Tugas dan kewajiban *Martapraja*, *Martanimpoena* serta struktur organisasi serta penarikan pajak dan sumber-sumber sekunder atau buku-buku referensi sebagai pendukung. Selain itu juga adanya nota-nota sebagai bukti transaksi. Data-data yang diperoleh berasal dari arsip koleksi perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran

- b. Kritik Sumber, terdiri dari kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan kritik yang meliputi tulisan, kata-kata, bahasa dan analisa verbal serta tentang kalimat yang berguna sebagai validitas sumber atau untuk membuktikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern, meliputi material yang digunakan guna mencapai kredibilitas sumber atau keaslian sumber tersebut. Dari hasil sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan adalah dokumen asli bahwasanya sumber-sumber itu sebagian berbahasa Belanda yang kuno dan bahasa Jawa lengkap dengan tulisan Jawa pula. Kondisi dari data yang mudah rusak karena bahan kertasnya sudah berusia sangat tua dan mudah repuh dan sobek. Terkadang tulisan yang berupa tulisan tangan sebagian ada tinta yang luntur sehingga susah untuk dibaca. Memilih dan memilah sumber-sumber yang akan dijadikan data, karena tidak semua arsip yang ditemukan dapat dijadikan sebagai data.
- c. Interpretasi atau penafsiran, yaitu menafsirkan keterangan-keterangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Setelah melakukan

kritik baik itu kritik intern maupun ekstern, maka penulis berusaha menjelaskan apa yang telah diperolehnya dari data dokumen itu dengan pemikiran dan analisa. Karena fakta itu terletak pada pikiran seseorang, maka itu menjadi bagian dari waktu sekarang.¹⁶ Sehingga interpretasi masing-masing sejarawan berbeda-beda.

- d. Historiografi atau penulisan sejarah, yaitu menyampaikan sumber yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Kemudian menceritakan apa yang telah ditafsirkan dalam penyusunan kisah sehingga menarik untuk dibaca. Penulisan dan penyusunan kisah dengan kata-kata dan gaya bahasa yang baik bertujuan supaya pembaca mudah memahami maksudnya dan tidak membosankan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus digunakan dalam mengadakan suatu penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Penulis dalam penulisan ini berusaha mencari sumber tertulis dan sejamin. Sumber tertulis (dokumen) sangat penting bagi penulisan sejarah ini. Dari dokumenlah terdapat fakta-fakta sejarah serta bahan yang akan ditulis. Dokumen

¹⁶ Dudung Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Halaman 41.

mempunyai nilai otentik dan dapat dipercaya.¹⁷ Dengan demikian dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Dalam memantapkan nilai suatu dokumen terhadap penggunaannya dalam ilmu sejarah, perlu diadakan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan objek yang berasal dari jaman itu, pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis misalnya surat kabar terbitan sejaman, dokumen tertulis, peraturan-peraturan, surat keputusan, laporan-laporan pemerintah, arsip pribadi yang belum diterbitkan, surat-surat keluarga dan catatan perjalanan.¹⁸ Bahan-bahan dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh penulis diantaranya: Makloemat Seri Padoeka Mangkoenagoro VIII no.1 tahun 1946, Peraturan dan Kebijaksanaan Masalah Urusan Pajak di Mangkunegaran a.l. ket. Adanya Macam-macam Pajak di Mangkunegaran 1944-1947, Surat Perintah no. 6947/24 tentang Tatanan Belandja *Martanimpoena*, *Kan Po*, 10 Oktober 2602 dan *Kan Po*, 9 Mei 2603; *Sinar Matahari* 22 Desember 1944; *Over de Vorstenlansche Mtortuigen Belasting* no. P 2500, *Grond Belasting* no. 1766 tentang pajak tanah. *Rijksblad* tahun 1917 No. 5 tentang tugas menarik pajak di wilayah Mangkunegaran.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran, Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta, Perpustakaan Umum Daerah

¹⁷ Louis Gotschalk, 1983, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman.18

¹⁸ Dudung Abdurrahman, 1999, *op.cit.*, halaman 31.

Surakarta. Dalam studi pustaka ini penulis berhasil menghimpun buku-buku, artikel-artikel serta terbitan-terbitan lain yang secara langsung menulis tentang masalah yang sesuai dengan topik permasalahan.

G. Sistematika Skripsi

Skripsi ini akan disusun bab demi bab untuk memberikan gambaran yang terperinci. Penyusunan ini dilandasi keinginan agar skripsi ini dapat menyajikan gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang berurutan.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tentang kondisi politik, sosial dan ekonomi di Praja Mangkunegaran pada masa perpindahan kekuasaan Belanda ke tangan Jepang (1942), kondisi politik, sosial dan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Surakarta selama tiga tahun (1942-1945) dan masa kemerdekaan (1945-1947).

Bab III membahas tentang struktur organisasi dari *Kabupaten Martanimpoena*, Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh *Kabupten Martanimpoena* dan sistem pelaksanaannya.

Bab IV menjelaskan pengaruh adanya perubahan sosial-politik terhadap *Kabupaten Martanimpoena* pada peralihan kekuasaan Belanda ke tangan Jepang, pengaruh kebijakan Jepang dan pengaruh kondisi kemerdekaan serta revolusi sosial yang terjadi di Surakarta tahun 1946.

Bab V merupakan kesimpulan dari semua isi dan penjelasan dalam penulisan skripsi ini.

